

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi

Fania Rahayu Putri^{1*}, Herlina Helmy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: faniarahayu2602@gmail.com

Tanggal Masuk:

25 Juli 2025

Tanggal Revisi:

29 September 2025

Tanggal Diterima:

17 Oktober 2025

Keywords: *Corporate Social Responsibility Disclosure; Family Ownership; Tax Avoidance.*

How to cite (APA 6th style)

Putri, F. R., & Helmy, H. (2025). Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (4), 1594-1611.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3431>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Abstract

This study examines the impact of family ownership on tax avoidance, with corporate social responsibility disclosure serving as a moderating variable. A quantitative research design was employed, utilizing secondary data obtained from manufacturing firms with family ownership listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021 to 2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 91 observational data points. Hypothesis testing was conducted through Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 30. The findings indicate that family ownership has no significant effect on tax avoidance, and CSR disclosure does not moderate the relationship between family ownership and tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran krusial dalam memastikan stabilitas dan kemajuan suatu negara. Pajak digunakan untuk mendanai program strategis negara dan investasi pemerintah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Marsahala et al., 2020). Kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak sangat penting untuk menopang peran pajak dalam pembangunan negara. Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1994 menegaskan bahwa badan usaha dengan bentuk dan nama apapun yang beroperasi di Indonesia ialah wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semua badan usaha yang aktif di Indonesia harus memenuhi kewajiban pajak mereka.

Meskipun pajak menjadi sumber pendapatan utama suatu negara, dari perspektif perusahaan pajak sering kali dipandang sebagai salah satu komponen biaya yang signifikan, yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan (Arifin et al., 2023). Tingginya beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan sering kali mendorong pelaku usaha untuk mencari berbagai strategi dalam rangka menekan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu pendekatan yang umum dilakukan ialah melalui praktik penghindaran pajak. Hal ini juga berkaitan dengan *self assessment system* yang digunakan di Indonesia yang memberikan

wewenang terhadap wajib pajak guna mengelola kewajiban pajaknya secara independen, sehingga tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem ini untuk melakukan penghindaran pajak (Krisna & Juliarto, 2024).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia sering melibatkan perusahaan besar dan merupakan masalah serius dalam pengelolaan pajak negara. Seperti, PT Adaro Energy Tbk. yang menggunakan penetapan harga transfer dengan unit usahanya di Singapura, Coaltrade Services International selama tahun 2009-2017. Menurut laporan Global Witness, Adaro diduga memindahkan US\$ 125 juta keperusahaan asing guna mengurangi beban pajak di Indonesia (Elliot, 2019).

Rendahnya rasio pajak di Indonesia juga menegaskan kekhawatiran akan maraknya praktik penghindaran pajak yang dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara, serta menunjukkan bahwa celah dalam regulasi perpajakan masih sering dimanfaatkan oleh wajib pajak (Firmansyah et al., 2022). Laporan *Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2024* yang dirilis oleh OECD mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, rasio perpajakan Indonesia tercatat sebesar 12,1%. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,3%, serta jauh tertinggal dari rata-rata negara anggota OECD yang berada pada level 34%. Angka ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, serta adanya kecenderungan untuk mengurangi beban pajak.

Penghindaran pajak selain mengurangi penerimaan pajak negara, juga berdampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Dalam studi yang dilakukan oleh Chen et al., (2010), penghindaran pajak diartikan sebagai suatu pendekatan yang diterapkan oleh entitas bisnis untuk menurunkan kewajiban pajak dengan cara mengeksploitasi celah, ambiguitas, atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun strategi ini sah secara hukum, dalam jangka panjang praktik tersebut berisiko mengurangi kualitas dan transparansi informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Ketika laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka kepercayaan investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya terhadap integritas perusahaan dapat menurun.

Penghindaran pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu determinan utama yang berkontribusi terhadap kecenderungan penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan perusahaan (Gaaya et al., 2017). Struktur kepemilikan mencerminkan pola distribusi saham dan kendali dalam perusahaan, yang dapat memengaruhi arah kebijakan strategis dan operasional, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban perpajakan. Beragam jenis struktur kepemilikan dapat ditemukan dalam perusahaan, salah satunya adalah kepemilikan yang dikelola oleh keluarga. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Maharani & Juliarto (2019), sebuah perusahaan dapat dikategorikan memiliki struktur kepemilikan keluarga jika satu maupun lebih anggota keluarga memegang kontrol signifikan atas saham perusahaan, baik secara langsung maupun melalui perantara. Persentase kepemilikan saham menentukan tingkat kendali dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memengaruhi pengelolaan kegiatan perusahaan. (Arifin et al., 2023).

Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga mendominasi komposisi modal perusahaan di Indonesia (Haryono et al., 2017; Setianto & Sari, 2017). Dominasi perusahaan keluarga dalam struktur korporasi di Indonesia menjadi salah satu alasan utama yang mendorong dilakukannya penelitian ini, khususnya dalam menelaah hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Penelitian ini menjadi relevan karena hasil dari berbagai studi sebelumnya terkait topik serupa masih menunjukkan ketidakkonsistenan (Chalevas et al., 2024; Gaaya et al., 2017; Kovermann & Wendt, 2019; Qawqzeh, 2023).

Penelitian ini juga menginvestigasi peran moderasi pengungkapan *corporate social responsibility* pada hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Teori

agensi menjelaskan bahwa meskipun konflik agensi relatif lebih kecil dalam perusahaan keluarga, masih terdapat potensi perilaku oportunistik manajer non-keluarga. Dalam hal ini, pengungkapan CSR berperan sebagai mekanisme kontrol yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga dalam menekan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, CSR diharapkan memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Pengungkapan CSR yang tinggi pada perusahaan keluarga dapat meningkatkan kepercayaan pihak luar dengan menunjukkan keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham yang lebih transparan (Boubaker et al., 2021).

Penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak serta bagaimana pengungkapan CSR dapat memoderasi pengaruh tersebut. Berbeda dengan penelitian Salma (2022), penelitian ini mengisi gap penelitian sebelumnya di Indonesia yang masih sedikit menggunakan GRI yang komprehensif.

Penelitian ini memanfaatkan sampel dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini rawan melakukan penghindaran pajak karena banyaknya transaksi lintas negara, intensitas asset tinggi dan insentif pajak. Selain itu, sektor ini juga merupakan salah satu sektor dengan jumlah perusahaan publik terbanyak yang tercatat di BEI, sehingga memberikan populasi penelitian yang lebih representatif dan bervariasi. Dengan cakupan yang lebih luas, diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat yang lebih besar.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) memperkenalkan teori agensi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan manajer (agen), di mana konflik muncul akibat perbedaan kepentingan. Manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi, terutama dalam kondisi asimetri informasi yang memungkinkan mereka menyembunyikan kebijakan agresif seperti penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015; Alkurdi & Mardini, 2020). Dalam kondisi tersebut, manajer dapat menyembunyikan praktik penghindaran pajak agresif yang berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan, baik dalam bentuk denda, pemeriksaan pajak, hingga kerusakan reputasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, pemegang saham perlu mengeluarkan *agency cost* untuk mengawasi manajer agar keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Struktur kepemilikan terpusat pada perusahaan keluarga menciptakan dinamika yang berbeda, di mana keluarga pendiri sering kali memegang saham mayoritas sekaligus terlibat langsung dalam manajemen puncak (Anderson & Reeb, 2003; Prencipe et al., 2014). Keterlibatan ini menyatukan peran pemilik dan manajer sehingga mengurangi konflik agensi, menurunkan kebutuhan pengawasan yang kompleks, dan secara otomatis menekan *agency cost* (Ali et al., 2007). Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya bebas konflik, terutama ketika manajemen eksternal turut terlibat dan kepentingan mereka tidak selalu sejalan dengan tujuan keluarga pemilik (Miller et al., 2007).

Teori keagenan menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana kepemilikan keluarga memengaruhi pengambilan keputusan pajak. Dalam konteks perusahaan keluarga, pemilik yang memiliki proporsi saham mayoritas cenderung memiliki kendali langsung atas kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi pajak. Berbeda dengan manajer profesional yang mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, pemilik keluarga umumnya memiliki perspektif jangka panjang dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan keluarga lebih selektif dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. Pertimbangan terhadap risiko reputasi, implikasi hukum, serta

pengaruh terhadap citra keluarga sebagai pemilik bisnis menjadi faktor penting yang membatasi agresivitas strategi pajak pada perusahaan keluarga.

Penghindaran Pajak

Dakhli (2022) memaparkan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang dikerjakan oleh wajib pajak melalui pemanfaatan celah, ketidaksempurnaan, atau ketentuan tertentu dalam regulasi perpajakan guna menurunkan beban pajak yang harus disetor secara sah. Meskipun secara hukum tindakan ini sah, penghindaran pajak tetap menjadi perhatian karena dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk menekan biaya pajak, yang sering dianggap sebagai salah satu beban terbesar yang memengaruhi profitabilitas dan nilai pemegang saham (Firmansyah et al., 2022).

Penghindaran pajak dapat menjadi penghambat bagi optimalisasi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menekan tingkat penghindaran pajak serendah mungkin guna memastikan bahwa realisasi penerimaan pajak dapat tercapai secara ideal dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan fiskal (Krisna & Juliarto, 2024). Penghindaran pajak berada dalam ranah abu-abu dalam sistem perpajakan, sehingga seringkali menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut melanggar ketentuan atau masih berada dalam batas legal.

Kepemilikan Keluarga

Struktur kepemilikan keluarga melibatkan pemegang saham dari satu atau lebih keluarga yang memiliki pengaruh dan kontrol besar dalam pengambilan keputusan perusahaan (Maharani & Juliarto, 2019). Anderson & Reeb (2003) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga merupakan perusahaan dimana pendiri atau anggota keluarganya selalu mengambil posisi di manajemen puncak, komite dewan, atau merupakan pemegang saham pengendali perusahaan, struktur kepemilikan dimana individu atau keluarga memiliki kontrol signifikan terhadap perusahaan. Kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang manajemen, tergantung pada bagaimana kepemilikan tersebut dipusatkan dan digunakan (Salancik & Pfeffer, 1980). Kekuasaan ini memungkinkan keluarga untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, dan memengaruhi keputusan penghindaran pajak (Villalonga & Amit, 2006).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Davis et al. (2016) menggambarkan CSR sebagai tindakan sukarela yang dilakukan perusahaan untuk melindungi lingkungan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berbagai pandangan tersebut menyoroti peran CSR sebagai upaya yang bersifat sukarela, berkelanjutan, dan bertujuan menciptakan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta perekonomian.

CSR mencerminkan hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat saat ini tidak hanya menilai perusahaan dari kemampuannya dalam menyediakan barang dan jasa, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR dipandang sebagai respons perusahaan atas ekspektasi sosial, sehingga pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku serta kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Pengungkapan informasi CSR juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak-pihak berkepentingan, terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Chairi (2008) menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki peran strategis dalam menarik minat investasi masyarakat,

yang pada gilirannya dapat memengaruhi fluktuasi harga dan volume perdagangan saham, serta berdampak pada pengambilan keputusan oleh investor.

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Di negara-negara berkembang, struktur kepemilikan perusahaan umumnya didominasi oleh model kepemilikan yang bersifat terkonsentrasi, di mana individu atau kelompok keluarga tertentu memegang kendali signifikan atas jalannya perusahaan (Villalonga & Amit, 2020). Perusahaan keluarga cenderung memiliki orientasi jangka panjang dan strategi konservatif, termasuk dalam praktik perpajakan, karena mereka berupaya menjaga kesinambungan bisnis lintas generasi (Chalevas et al., 2024). Strategi konservatif ini tercermin dalam kecenderungan mereka untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif, guna melindungi reputasi dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan investor (Ibrahim et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan konsep agensi, yaitu kepemilikan keluarga cenderung menimbulkan konflik keagenan yang lebih sedikit karena pemilik sering kali juga terlibat langsung dalam manajemen, sehingga kepentingan antara pemilik dan manajer menjadi lebih selaras dengan kepentingan jangka panjang pemilik (Jensen & Meckling, 1976; Armstrong et al., 2015). Sehingga, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan perpajakan, dan lebih cenderung untuk menjauhi praktik penghindaran pajak yang agresif.

Beberapa studi mengindikasikan bahwa perusahaan keluarga lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan daripada perusahaan yang bukan dimiliki oleh keluarga. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap sanksi hukum dan risiko reputasi, tetapi juga oleh nilai-nilai etika bisnis yang dianut dan orientasi jangka panjang yang dimiliki keluarga sebagai pemilik (Chen et al., 2010; Ibrahim et al., 2021; Chalevas et al., 2024). Oleh karena itu, kepemilikan keluarga diasosiasikan kurang agresif dalam praktik penghindaran pajak. Merujuk pada landasan teoritis serta temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan ialah:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Memperkuat Hubungan Negatif Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

CSR sering kali digunakan oleh perusahaan untuk membangun reputasi, meningkatkan legitimasi, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan regulator (Davis et al., 2016). Selain itu, CSR juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku manajerial, di mana pengungkapan CSR dapat berfungsi guna mendorong peningkatan akuntabilitas serta transparansi perusahaan diberbagai aspek, termasuk aspek perpajakan. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis. Namun, tanpa adanya tekanan atau mekanisme kontrol eksternal, motivasi tersebut belum tentu terealisasi dalam praktik perpajakan. CSR sebagai wujud pengungkapan sosial serta lingkungan bisa menjadi sinyal bagi publik mengenai komitmen etis perusahaan. Meningkatnya pengungkapan CSR, tekanan sosial pada perusahaan juga meningkat, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut teori agensi, manajer yang memiliki kepentingan pribadi dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan pemilik, termasuk melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh manfaat jangka pendek (Armstrong et al., 2015). Dalam hal ini, CSR dapat menjadi sarana untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas manajerial, karena pengungkapan CSR menciptakan ekspektasi

dari masyarakat agar perusahaan bertindak secara etis dan transparan. Pada perusahaan keluarga, risiko konflik keagenan memang cenderung lebih rendah karena pemilik sering kali terlibat langsung dengan manajer puncak. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan keluarga sepenuhnya dikelola oleh anggota keluarga. Dengan demikian, CSR tetap memiliki peran krusial dalam memperkuat komitmen perusahaan keluarga terhadap etika dan kepatuhan, termasuk dalam aspek perpajakan (Lanis & Richardson, 2015).

Dengan demikian, CSR dapat berfungsi sebagai mekanisme moderasi yang memperkuat hubungan negatif kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Pada perusahaan keluarga, orientasi jangka panjang dan kepedulian terhadap reputasi memang membuat mereka cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan. Namun, ketika tingkat pengungkapan CSR tinggi, tekanan sosial, pengawasan eksternal, dan ekspektasi etis semakin meningkat, sehingga insentif perusahaan keluarga untuk menjauhi praktik penghindaran pajak menjadi lebih kuat. Berdasarkan landasan teoritis serta temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, hipotesis yang dirumuskan ialah:

H2: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* mampu memperkuat hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengujian teori serta analisis keterkaitan sebab-akibat antar variabel secara empiris. Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan peran pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2021-2023.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga minimal 10% yang dilihat dari laporan tahunan yang tercatat di BEI selama 2021 hingga 2023. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel untuk memastikan sampel yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Table 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023	164
2	Perusahaan Manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan keluarga $\geq 10\%$	-104
3	Perusahaan yang tidak menyajikan annual report secara berturut-turut pada periode 2021-2023	-4
4	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah	-9
5	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba secara berturut-turut pada periode 2021-2023	-16
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	31
	Total sampel penelitian (2021-2023)	93
	Data Outlier	2
	Total sampel akhir penelitian	91

Sumber: Data diolah (2025)

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs-esmi masing-masing perusahaan selama tahun 2021 hingga 2023. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dengan mengakses annual report serta laporan keberlanjutan perusahaan. Data yang terkumpul kemudian diolah guna menghitung nilai-nilai yang merepresentasikan variabel-variabel penelitian.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada taktik untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak (Chen et al., 2010). Penghindaran pajak dihitung berdasarkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung sebagai perbandingan antara jumlah kas yang dibayarkan untuk kewajiban pajak dengan laba sebelum pajak.

Penggunaan CETR dipilih karena dianggap sebagai indikator yang representatif dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak dibandingkan proksi lainnya. CETR mampu mencerminkan jumlah pajak tunai yang benar-benar disetor oleh perusahaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai praktik penghematan pajak (Dyreng et al., 2010).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax expense}}{\text{Total Pretax Income}}$$

Cash tax expense mengacu pada jumlah pajak yang secara aktual dibayarkan oleh perusahaan dan dapat ditemukan dalam laporan arus kas periode berjalan, khususnya pada bagian arus kas dari aktivitas operasi, dalam pos pembayaran pajak penghasilan. Sementara itu, *total pretax income* merupakan profit perusahaan sebelum pajak selama satu periode, yang tercantum dalam laporan laba rugi.

Kepemilikan Keluarga

Anderson & Reeb (2003) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan dimana pendiri atau anggota keluarganya terus mengambil posisi di manajemen puncak, komite dewan atau merupakan pemegang saham pengendali perusahaan. Perusahaan dianggap sebagai perusahaan keluarga apabila pemegang saham pengendali utama dengan kepemilikan saham minimal 10% merupakan keluarga, dan setidaknya satu anggota keluarga pengendali berada di dewan direksi atau bagian dari manajemen puncak (Boubaker & Labégorre, 2008; Gomez Meijia et al., 2010; Nekhili et al., 2016).

Mengacu pada penelitian (Litz, 1995; Villalonga & Amit, 2006; Zahra, 2003), kepemilikan keluarga diukur berdasarkan jumlah saham dari semua kelas yang dimiliki oleh keluarga dibagi dengan total saham yang beredar. Pembilangnya merupakan jumlah dari kepemilikan saham pribadi keluarga, kepemilikan saham keluarga pada perusahaan yang tidak terdaftar, kepemilikan saham yayasan keluarga, dan kepemilikan saham keluarga pada perusahaan yang terdaftar. Pengukuran kepemilikan keluarga dilakukan sebagai berikut:

$$KK = \frac{\text{Total saham keluarga}}{\text{Total saham perusahaan}}$$

Variabel kepemilikan keluarga disusun dengan menetapkan ambang batas 10% kepemilikan saham oleh anggota keluarga. Kepemilikan sebesar 10% ini dianggap dapat menunjukkan kepemilikan signifikan yang dapat memengaruhi perusahaan (Nekhili et al., 2017).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

CSR merupakan inisiatif sukarela yang diambil oleh entitas usaha untuk melindungi lingkungan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Davis et al., 2016). Pengukuran CSR dilakukan berdasarkan pedoman GRI Standards yang terdiri dari 77 indikator. Karena tidak semua indikator relevan untuk setiap sektor industri, maka indikator yang tidak relevan dikeluarkan dari denominator. Dengan demikian, indeks CSR dihitung sebagai proporsi jumlah indikator relevan yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau keberlanjutan perusahaan terhadap jumlah total indikator relevan bagi perusahaan tersebut.

Setiap indikator dinilai dengan pendekatan content analysis berbasis data dummy, yaitu diberi skor 1 jika diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan.

$$CSR_i = \sum \frac{X_{yi}}{N_i}$$

CSR_i yaitu indeks pengungkapan CSR perusahaan i, X_{yi} yaitu jumlah item CSR yang diungkapkan dan N_i yaitu jumlah item Perusahaan i, $i < 77$

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Moderasi

Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA), yang ditujukan untuk mengungkapkan adanya pengaruh interaksi antar variabel independen dan moderasi. Teknik ini digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat pengungkapan CSR berkontribusi dalam memperkuat keterkaitan antara kepemilikan keluarga dan praktik penghindaran pajak.

Model persamaan yang digunakan:

Persamaan 1: $CETR = \alpha + \beta_1 KK + \beta_2 CSR + e$

Persamaan 2: $CETR = \alpha + \beta_1 KK + \beta_2 CSR + \beta_3 KK * CSR + e$

Keterangan:

CETR = Penghindaran Pajak

KK = Kepemilikan Keluarga

CSR = *Corporate Social Responsibility*

KK*CSR = Interaksi antara Kepemilikan keluarga dengan CSR

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif diterapkan guna memaparkan informasi umum variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Hasil analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	91	0,2130	0,9080	0,5594	0,2060
CETR	91	0,0390	0,4970	0,2233	0,0890
CSR	91	0,0780	0,8180	0,3626	0,1313

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Mengacu pada Table 2 mengenai statistik deskriptif, total keseluruhan observasi mencakup 91 sampel. Variabel penghindaran pajak diukur dengan CETR. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai CETR terendah tercatat sebesar 0,039, nilai tertinggi mencapai 0,4970. CETR yang rendah berarti pajak yang dibayarkan relatif kecil sehingga mengindikasikan penghindaran pajak yang tinggi. Mean CETR 0,2233 berarti rata-rata Perusahaan hanya membayar 22% dari laba sebelum pajak. Angka ini rendah dibandingkan tarif pajak 22% - 25%. Standar deviasi 0,0890 mengindikasikan bahwa variasi nilai CETR

antar perusahaan relatif rendah, yang berarti tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam sampel menunjukkan pola yang cukup seragam.

Variabel kepemilikan keluarga dihitung dari persentase saham oleh anggota keluarga dibandingkan dengan saham yang beredar di perusahaan. Berdasarkan hasil distribusi data, nilai kepemilikan keluarga terendah tercatat sebesar 0,2130, nilai tertinggi mencapai 0,9080. Mean kepemilikan keluarga 0,5594 mengindikasikan bahwa secara umum keterlibatan kepemilikan keluarga dalam struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan sampel tergolong tinggi. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0,2060 mencerminkan adanya tingkat dispersi yang cukup besar dalam data, yang mengindikasikan bahwa terdapat variasi yang signifikan antar perusahaan terkait besarnya persentase kepemilikan saham oleh anggota keluarga.

Pengungkapan CSR mengacu pada *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* yang mencakup 77 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai pengungkapan CSR terendah 0,0780, dan nilai tertinggi 0,8180. Mean skor pengungkapan CSR 0,3626 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengungkapan CSR di antara perusahaan-perusahaan sampel masih tergolong rendah. Adapun standar deviasi 0,1313 menggambarkan variasi yang tinggi antar perusahaan dalam mengungkapkan CSR.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* bertujuan untuk membuktikan bahwa nilai sisa dalam model regresi terdistribusi normal.

Tabel 3
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,08859120
Most Extreme Differences	Absolute	0,054
	Positive	0,054
	Negative	-0,051
Test Statistic		0,054
Asymp. Sig. (2-tailed)^c		.200 ^d

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Merujuk pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang melebihi ambang signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji ini ditujukan untuk memastikan bahwa masing-masing variable bebas bersifat independent satu sama lain agar tidak menimbulkan distorsi dalam estimasi parameter regresi.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	0,224	0,040		5,542	0,000		
KK	-0,027	0,046	-0,063	-0,584	0,561	0,983	1,017
CSRD	0,041	0,073	0,060	0,565	0,574	0,983	1,017

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Merujuk pada hasil di atas, diketahui korelasi antara variabel independent dan variabel moderasi relatif rendah. Terlihat dari nilai *toleranc* yang seluruhnya melebihi angka 0,10 serta nilai *VIF* di bawah 10. Disimpulkan bahwa modle regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diaplikasikan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual antar observasi pada model regresi, yang berpotensi memengaruhi keakuratan estimasi parameter. Tujuan dari uji ini ialah guna memastikan varians residual bersifat homogen.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	0,111	0,025		4,416	0,000
KK	-0,032	0,029	-0,118	-1,116	0,268
CSRD	-0,069	0,045	-0,161	-1,526	0,131

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Dilakukan uji menggunakan metode Glejser yang menunjukkan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi variabel independen dan moderasi melebihi ambang signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,268 dan 0,131.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Watson (DW) dilakukan guna mendeteksi adanya korelasi antar nilai-nilai residual (kesalahan error) dalam observasi *time series*.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.070 ^a	0,005	-0,018	0,08626	1,993

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Merujuk pada hasil uji Durbin-Watson, diperoleh nilai statistik $d = 1,993$, k sebanyak 2 dan total sampel sejumlah 91, dU dan dL menurut table distribusi masing-masing ialah 1,7040 dan 1,6143. Nilai d berada dalam rentang antara dU dan $(4 - dU)$, yaitu $1,7040 < 1,993 < 2,296$, Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan dalam rangka mengetahui signifikansi pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara simultant. Persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: CETR} = \alpha + \beta_1 \text{KK} + \beta_1 \text{CSR} + e$$

Analisis regresi ini difokuskan pada pengujian pengaruh langsung variabel kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan variabel interaksi dalam model.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Persamaan 1)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	0,224	0,012		18,475	0,000
KK	-0,027	0,014	-0,200	-1,947	0,055
CSR	0,041	0,022	0,193	1,883	0,063

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Berdasarkan table 7 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,224 - 0,027 \text{KK} + 0,041 + e$$

Berdasarkan hasil estimasi model regresi, nilai constanta tercatat 0,224. Ini artinya, ketika seluruh variabel independent bernilai nol, maka tingkat penghindaran pajak diperkirakan berada pada angka 0,224. Koefisien regresi pada variabel kepemilikan keluarga -0,027 menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam kepemilikan keluarga berasosiasi dengan menurunnya tingkat penghindaran pajak sebesar 0,027. Sebaliknya, koefisien regresi untuk variabel pengungkapan CSR sebesar 0,041 mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan dalam tingkat pengungkapan CSR akan berkontribusi terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak sebesar 0,041.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) memaparkan proporsi varians pada variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh keseluruhan variabel independent dalam model regresi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi memiliki kemampuan prediktif terhadap variabel dependen atas variabel-variabel independent yang dianalisis. Ukuran koefisien determinasi direpresentasikan melalui nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 1)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.296 ^a	0,087	0,067	0,02688

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Merujuk pada hasil analisis, diketahui bahwa variabel kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR hanya mampu menjelaskan sebesar 6,7% variasi terhadap tingkat penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square*. Temuan ini mengindikasikan bahwa 93,3% variasi dalam penghindaran pajak berasal dari faktor-faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.318 ^a	0,101	0,070	0,02683

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Model regresi ke-2 menunjukkan adanya peningkatan nilai *Adjusted R Square* 0.3% dibandingkan dengan model regresi pertama. Nilai *Adjusted R Square* pada model kedua tercatat 0,070, mengindikasikan sebesar 7% variasi dalam tingkat penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh interaksi antara variabel kepemilikan keluarga serta pengungkapan CSR. Sementara itu, sisanya 93% diakibatkan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan guna mengevaluasi signifikansi pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi. Nilai signifikansi (*sig*) yang kurang dari 0,05, maka variabel independent secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 10
Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,006	2	0,003	4,219	.018 ^b
Residual	0,064	88	0,001		
Total	0,070	90			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Nilai signifikansi 0,018 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR secara kolektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai tersebut dibawah ambang signifikansi 0,05.

Uji T (Parsial)

Uji t diaplikasikan untuk menilai signifikansi pengaruh variabel independent secara terpisah terhadap variabel terikat, dengan nilai $\text{sig} < 0,05$ sebagai indikator pengaruh signifikan.

Tabel 11
Hasil Uji t (Persamaan 1)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,224	0,012		18,475	0,000
KK	-0,027	0,014	-0,200	-1,947	0,055
CSR	0,041	0,022	0,193	1,883	0,063

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Hipotesis pertama (H1) yaitu kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, merujuk pada hasil analisis regresi yang dianalisis, didapat nilai *t-hitung* untuk variabel kepemilikan keluarga -1,947, dengan nilai probabilitas (*p-value*) 0,055. Nilai probabilitas tersebut berada di atas ambang signifikansi 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa secara statistik, tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari kepemilikan keluarga terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sehingga H_0 diterima dan **H₁ ditolak**.

Moderated Regression Analysis

Uji interaksi dalam *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara suatu variabel independent dan variabel terikat dipengaruhi atau dimoderasi oleh variabel independen lainnya. Pada penelitian ini, model regresi kedua diformulasikan untuk menguji peran pengungkapan CSR sebagai variabel moderator dalam hubungan antara kepemilikan keluarga dan praktik penghindaran pajak.

Persamaan 2: $CETR = \alpha + \beta_1 KK + \beta_2 CSR + \beta_3 KK * CSR + e$

Tabel 12
Hasil Moderated Regression Analysis (Persamaan 2)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,192	0,030		6,339	0,000
KK	0,025	0,047	0,183	0,521	0,604
CSR	0,124	0,076	0,584	1,634	0,106
KK*CSR	-0,137	0,120	-0,523	-1,141	0,257

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 30, Tahun 2025

Hipotesis kedua (H₂) pengungkapan CSR memperkuat pengaruh negative kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. berdasarkan hasil analisis MRA pada tabel 13, diperoleh nilai *t-hitung* untuk variabel interaksi antara kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR (KK*CSR) sebesar -1,141 dengan nilai probabilitas sebesar 0,257. Karena nilai probabilitas tersebut melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistic. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi pengaruh negatif

kepemilikan keluarga terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak tidak signifikan, dengan nilai t -0,891 dan tingkat signifikansi 0,375 di atas ambang batas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama dinyatakan tidak didukung atau ditolak.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil studi terdahulu (Maharani & Juliarto, 2019; Mawaddah & Darsono, 2022; Selistiaweni et al., 2020) yang mengindikasikan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilik keluarga dalam struktur perusahaan bukanlah determinan utama yang mendorong manajemen untuk menghindari pajak. Salah satu alasannya adalah variabilitas kepemilikan keluarga yang tinggi antar perusahaan, sehingga pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak menjadi tidak konsisten. Dalam beberapa perusahaan keluarga, nilai-nilai etis dan orientasi jangka panjang mendorong kepatuhan, namun dalam kasus lain orientasi ekonomi jangka pendek tetap mendominasi.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Hipotesis kedua penelitian ini mengusulkan bahwa pengungkapan CSR memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Namun, hasil analisis empiris tidak mendukung hipotesis tersebut. Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 12, nilai t untuk variabel interaksi antara CSR dan kepemilikan keluarga ($CSR*KK$) tercatat sebesar -1,066 dengan tingkat signifikansi 0,289, yang melebihi ambang batas signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua dinyatakan ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR yang diimplementasikan perusahaan belum efektif dalam mengurangi kecenderungan perusahaan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Kovermann & Wendt (2019) perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk memperhatikan legitimasi jangka panjang karena orientasi terhadap kelangsungan usaha lintas generasi. Dan CSR diharapkan menjadi alat legitimasi yang dapat menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk bersikap lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya (Boubaker et al., 2021). Namun dalam praktiknya, orientasi jangka panjang tidak selalu diwujudkan dalam tata kelola yang transparan dan etis.

Temuan ini selaras dengan penelitian Wardani & Purwaningrum (2018) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak selalu memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar kegiatan CSR dilakukan lebih sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab serta sosial perusahaan, tanpa diarahkan secara khusus sebagai mekanisme untuk membangun legitimasi dalam hal kepatuhan perpajakan. Demikian pula, Lanis & Richardson (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR belum tentu mengurangi agresivitas pajak, terutama jika CSR tidak dijalankan secara konsisten dan komprehensif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, dan pengungkapan CSR juga tidak terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Hasil ini dapat diinterpretasikan dalam kerangka teori agensi. Berdasarkan teori agensi, keterlibatan langsung pemilik keluarga seharusnya mengurangi konflik keagenan dan menekan perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak, namun dalam konteks Indonesia, pengaruh tersebut mungkin tidak terlihat karena lemahnya tata kelola perusahaan serta heterogenitas struktur kepemilikan keluarga. Pengungkapan CSR diharapkan memperkuat tekanan sosial agar perusahaan bertindak etis, tetapi pada praktiknya CSR disclosure di Indonesia masih relatif rendah dan cenderung bersifat simbolis, sehingga tidak cukup efektif mengendalikan praktik perpajakan.

Secara akademis, hasil penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa peran kepemilikan keluarga maupun CSR tidak dapat digeneralisasi sebagai determinan utama penghindaran pajak, terutama dalam konteks negara berkembang dengan karakteristik corporate governance yang lemah. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya regulator seperti DJP dan OJK untuk memperkuat keterbukaan struktur kepemilikan keluarga serta mendorong kualitas pengungkapan CSR agar benar-benar berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dan pengendalian etis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan keterbatasan pengaruh kepemilikan keluarga dan CSR terhadap penghindaran pajak, tetapi juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai faktor lain yang lebih menentukan perilaku perpajakan perusahaan di Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang meskipun umum dipakai, tetap rentan bias karena dipengaruhi akrual pajak dan insentif fiskal tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan strategi penghindaran pajak yang kompleks. Kedua, identifikasi kepemilikan keluarga berpotensi menghadapi salah klasifikasi karena tidak semua struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia dipublikasikan secara transparan. Ketiga, pengukuran pengungkapan CSR menggunakan metode dummy berbasis indikator GRI lebih menekankan kuantitas daripada kualitas informasi, sehingga hasilnya bisa terbatas. Keempat, model penelitian menunjukkan nilai R^2 yang relatif rendah, menandakan bahwa masih banyak variabel lain di luar kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak tetapi belum terakomodasi.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat diarahkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Dari sisi akademis, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak. Dari sisi metodologis, pengukuran penghindaran pajak dapat diuji dengan proksi alternatif seperti GAAP ETR atau Book-Tax Differences (BTD) untuk mengurangi bias CETR. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberi implikasi bahwa regulator seperti DJP dan OJK perlu mendorong keterbukaan struktur kepemilikan keluarga serta meningkatkan kualitas dan transparansi pengungkapan CSR, sehingga CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dan pengendalian etis dalam praktik perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Chen, T. Y., & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 238–286. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.006>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*, 58(3), 1301–1327. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00567>
- Arifin, Y. N., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 44. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.1005>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Boubaker, S., Derouiche, I., & Nguyen, H. (2021). Voluntary disclosure, tax avoidance and family firms. *Journal of Management and Governance*, 26(1), 129–158. <https://doi.org/10.1007/s10997-021-09601-w>
- Boubaker, S., & Labégorre, F. (2008). Ownership structure, corporate governance and analyst following: A study of French listed firms. *Journal of Banking & Finance*, 32(6).
- Chalevas, C. G., Doukakis, L. C., Karampinis, N. I., & Pavlopoulou, O. C. (2024). The impact of family ownership on tax avoidance: International evidence. *International Review of Financial Analysis*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103317>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes? *The Accounting Review*, 91(1), 47–68. <https://doi.org/10.2308/accr-51224>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Elliot, C. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Agung, D., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Heliyon Political connections , investment opportunity sets , tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role ? *Heliyon*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>

- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gomez-Mejia, L. R., Makri, M., & Larraza-Kintana, M. (2010). Diversification Decisions in Family-Controlled Firms. *Journal of Management Studies*, 47(2), 223–252.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Haryono, S. A., Fitriany, F., & Fatima, E. (2017). Pengaruh Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 119–141. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.07>
- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *The of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Krisna, P. V. A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–15.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Litz, R. A. (1995). The Family Business: Toward Definitional Clarity. *Family Business Review*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.17416248.1995.00071>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, capital intensity, and tax avoidance: The effect of Commissioner’s competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Mawaddah, S. Z., & Darsono. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–11.
- Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester, R. H., & Cannella, A. A. (2007). Are family firms really superior performers? *Journal of Corporate Finance*, 13(5), 829–858. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2007.03.004>
- Nekhili, M., Chakroun, H., & Chtioui, T. (2016). Women’s Leadership and Firm Performance: Family Versus Nonfamily Firms. *Journal of Business Ethics*, 153, 291–316.
- Nekhili, M., Nagati, H., Chtioui, T., & Rebolledo, C. (2017). Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms. *Journal of Business Research*, 77(March), 41–52. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.001>
- OECD. (2024, June 25). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 23(4), 449–477. <https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1017590>

- Prencipe, A., Bar-Yosef, S., & Dekker, H. C. (2014). Accounting research in family firms: Theoretical and empirical challenges. *European Accounting Review*, 23(3), 361–385. <https://doi.org/10.1080/09638180.2014.895621>
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Raimo, N., Vitolla, F., Marrone, A., & Rubino, M. (2020). The role of ownership structure in integrated reporting policies. *Business Strategy and the Environment*, 1(13). <https://doi.org/10.1002/bse.2498>
- Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (1980). Effects of Ownership and Performance on Executive Tenure in U.S. Corporations. *The Academy of Management Journal*, 23(4), 653–664.
- Salma, R. A. (2022). Dampak Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *STIE Indonesia Banking School*. [http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/4068%0Ahttp://repository.ibs.ac.id/4068/2/BAB 1 SKRIPSI - Rafida Alifa 20161112057.pdf](http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/4068%0Ahttp://repository.ibs.ac.id/4068/2/BAB%201%20SKRIPSI%20-%20Rafida%20Alifa%2020161112057.pdf)
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 751–763.
- Setianto, R. H., & Sari, P. K. (2017). Perusahaan Keluarga dan Kebijakan Dividen di Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 21(2), 107–118. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss2.art1>
- Tax Justice Network. (2022, November 15). *State of Tax Justice 2022*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/reports/state-of-tax-justice-2022/>
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Villalonga, B., & Amit, R. (2020). Family ownership. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(2), 241–257. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa007>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1). <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>
- World Business Council for Sustainable Development. (2000). *Corporate social responsibility: Making good business sense*. Geneva: WBCSD.
- Zahra, S. A. (2003). International expansion of U.S. manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement. *Journal of Business Venturing*, 18, 495–512. [https://doi.org/DOI:10.1016/S0883-9026\(03\)00057 0](https://doi.org/DOI:10.1016/S0883-9026(03)00057-0)